

## ANALISIS KETIMPANGAN WILAYAH DAN POTENSI EKONOMI DI KAWASAN KEDUNGSEPUR TAHUN 2017-2021

Ilham Al Majiid<sup>1</sup>, Neni Woyanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang

<sup>2</sup> Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang  
e-mail: almajid558@gmail.com, neniwoyanti346@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengklasifikasikan pola pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota, menganalisis besarnya tingkat ketimpangan wilayah, dan mengidentifikasi sektor-sektor dengan potensi untuk dikembangkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini, diolah menggunakan analisis Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Indeks Theil, Location Quotient (LQ), dan Shift-Share. Hasil temuan menunjukkan bahwa sebagian besar pola pertumbuhan kabupaten/kota di Kedungsepur termasuk daerah relatif tertinggal. Tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur pada tahun 2017-2021 relatif tinggi dan cenderung mengalami kenaikan. Potensi sektor ekonomi yang berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Kawasan Kedungsepur adalah sektor pertambangan dan sektor jasa-jasa di Kabupaten Grobogan; sektor jasa-jasa di Kabupaten Demak; sektor jasa pendidikan di Kabupaten Semarang; sektor pertambangan dan sektor pertanian di Kabupaten Kendal; sektor akomodasi dan makan minum, dan sektor jasa perusahaan di Kota Salatiga; serta sektor informasi dan komunikasi di Kota Semarang.

**Kata kunci:** Ketimpangan regional, Potensi ekonomi, Pertumbuhan ekonomi, Kedungsepur

### Abstract

*This study intends to classify economic growth patterns between districts/cities, analyze the degree of regional inequality, and identify sectors with the potential to be evolved to boost the regional economy in the Kedungsepur area. Secondary data is used in this study, which was processed using Klassen Typology, Williamson Index, Theil Index, Location Quotient (LQ), and Shift-Share analysis. The findings indicate that most of the growth patterns of districts/cities in Kedungsepur are relatively underdeveloped areas. The level of inequality between districts/cities in the Kedungsepur area in 2017-2021 is relatively high and tends to increase. Economic potentials that are useful for encouraging regional economic growth in the Kedungsepur area are the mining sector and the services sector in Grobogan Regency; the services sector in Demak Regency; the education services sector in Semarang Regency; the mining sector and agricultural sector in Kendal Regency; the accommodation and food service sector and business service sector in Salatiga City; and the information and communication sector in Semarang City.*

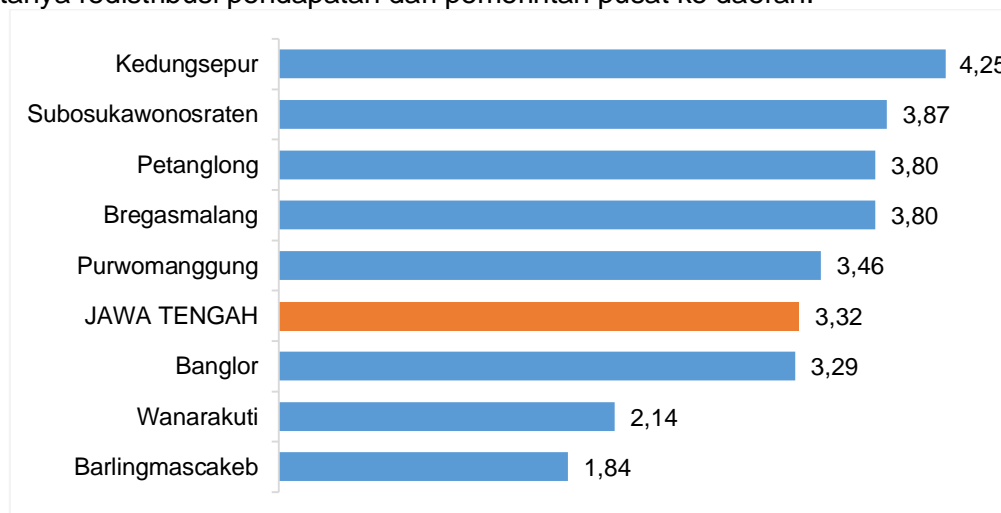
**Keywords:** Regional inequality, Economic potential, Economic growth, Kedungsepur

## 1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan persoalan penting dalam perekonomian, tidak hanya dalam lingkup nasional namun juga dalam lingkup regional/wilayah. Todaro dan Smith (2012: 22-23) menyebutkan bahwa dalam proses pembangunan ekonomi setidaknya memiliki tiga tujuan pembangunan, yaitu untuk meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan pokok; meningkatkan taraf hidup; dan memperluas pilihan ekonomi dan sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah sasaran akhir dari pembangunan itu sendiri.

Standar keberhasilan pembangunan ekonomi dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi dan rendahnya disparitas pendapatan antarpenduduk, wilayah, dan sektor (Vaulina dan Liana, 2015). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya menandakan semakin baik perekonomian suatu daerah. Namun permasalahan pembangunan berupa ketimpangan pembangunan antar wilayah akan muncul, jika pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan. Ketimpangan wilayah telah menjadi persoalan historis yang melanda setiap wilayah mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kepulauan bahkan seluruh dunia (Kadriwansyah, Semmaila dan Zakaria, 2021). Yuliani (2015) mengemukakan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat mempengaruhi keseimbangan siklus kegiatan ekonomi yang berdampak pada ketimpangan kemakmuran antar wilayah.

Pada dasarnya penyebab utama ketimpangan wilayah adalah perbedaan kondisi demografi dan kandungan sumber daya alam yang tersedia di setiap wilayah. Akibat perbedaan tersebut, setiap daerah seringkali terdapat daerah maju (*Development Region*) dan daerah tertinggal (*Underdevelopment Region*). Hal ini karena setiap daerah memiliki kapasitas yang berbeda dalam mendorong proses pembangunan (Sjafrizal, 2008:104). Lebih lanjut Mopangga (2011) menyebutkan bahwa tingkat kemajuan tiap daerah tidak sama dikarenakan kurangnya sumber daya yang tersedia, preferensi investor untuk memilih daerah dengan infrastruktur yang lengkap dan tenaga kerja terampil, serta tidak meratanya redistribusi pendapatan dari pemerintah pusat ke daerah.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (2022)

Gambar 1. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah 2017-2021 (%)

Kawasan Kedungsepur merupakan salah satu kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029. Gambar 1 menunjukkan bahwa Kawasan Kedungsepur mempunyai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi selama periode tahun 2017-2021 sebesar 4,25% diantara kawasan strategis lainnya. Pertumbuhan ekonomi Kawasan Kedungsepur juga lebih besar

dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (3,32%) menunjukkan pertumbuhan yang cepat dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian, justru sebagian besar kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur memiliki pertumbuhan ekonomi berada dibawah 4,25 %, kecuali Kota Semarang sebesar 4,66% seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan atau kurang meratanya pembangunan antar kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Kedungsepur Tahun 2017-2021 (%)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
Kabupaten Grobogan	5,85	5,83	5,37	-1,57	3,78	3,85
Kabupaten Demak	5,82	5,40	5,36	-0,23	2,62	3,79
Kabupaten Semarang	5,65	5,67	5,39	-2,67	3,63	3,53
Kabupaten Kendal	5,78	5,77	5,71	-1,51	3,89	3,93
Kota Salatiga	5,58	5,84	5,90	-1,68	3,33	3,79
Kota Semarang	6,70	6,48	6,81	-1,85	5,16	4,66
<b>Kedungsepur</b>	<b>6,26</b>	<b>6,12</b>	<b>6,22</b>	<b>-1,78</b>	<b>4,43</b>	<b>4,25</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (2022)

Disamping itu, Tabel 2 memperlihatkan bahwa PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perkapita kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur memiliki selisih yang cukup besar antara PDRB perkapita tertinggi dengan terendah, yaitu antara Kota Semarang dengan Kabupaten Grobogan. Iswanto (2015) menyatakan bahwa PDRB per kapita merupakan salah satu teknik yang dapat menjadi ukuran tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Jadi, adanya selisih PDRB perkapita antar daerah menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antar kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut dapat diduga bahwa di Kawasan Kedungsepur terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Tabel 2. PDRB Perkapita Kawasan Kedungsepur Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
Kabupaten Grobogan	12,94	13,63	14,29	13,34	13,77	13,59
Kabupaten Demak	14,54	15,18	15,84	15,26	15,55	15,27
Kabupaten Semarang	31,15	32,50	33,82	32,94	33,92	32,86
Kabupaten Kendal	28,89	30,33	31,84	29,90	30,86	30,36
Kota Salatiga	45,65	47,65	49,81	49,42	50,74	48,65
Kota Semarang	70,14	73,49	77,28	83,22	87,36	78,30
<b>Kedungsepur</b>	<b>35,08</b>	<b>36,83</b>	<b>38,72</b>	<b>38,02</b>	<b>39,51</b>	<b>37,63</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (2022)

Untuk mengupayakan peningkatan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan antar wilayah, dapat dilakukan dengan menganalisis atau menggali sektor-sektor berpotensi untuk dikembangkan. Menurut Sutrisno (2012), sektor yang berpotensi merupakan sektor dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif mengacu pada sektor yang dapat memenuhi permintaan domestik dan mengeksport sisanya ke daerah lain, sedangkan keunggulan kompetitif mengacu pada sektor yang mempunyai daya saing di pasar (Sutrisno, 2012). Sehingga, dengan mendorong sektor-sektor potensial tersebut diharapkan dapat menekan ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi antar daerah di Kawasan Kedungsepur. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengklasifikasikan pola pertumbuhan ekonomi, menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan daerah, dan mengidentifikasi sektor-sektor yang berpotensi dikembangkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah di Kawasan Kedungsepur.

## 2. Metode

Studi ini menggunakan data sekunder untuk periode tahun 2017-2021 pada enam Kabupaten/Kota dalam Kawasan Kedungsepur. Studi ini mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah meliputi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsepur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Indeks Theil, Location Quotient, dan Shift-Share.

### Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk menggambarkan struktur dan pola pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Dari analisis ini dapat diketahui pembangunan telah dilaksanakan secara merata di semua wilayah ataukah sebaliknya (Iskandar dan Saragih, 2018). Aswandi dan Kuncoro (2002) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita daerah menjadi dua indikator utama dalam Tipologi Klassen untuk mengklasifikasikan daerah. Daerah yang diidentifikasi dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi empat klasifikasi dengan menetapkan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai garis vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai garis horizontal. Keempat klasifikasi tersebut antara lain: daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Aswandi dan Kuncoro, 2002).

Tabel 3. Matriks Tipologi Klassen

	$y_i > \bar{y}$	$y_i < \bar{y}$
$r_i > \bar{r}$	Kuadran I Daerah maju dan cepat tumbuh	Kuadran III Daerah berkembang cepat
$r_i < \bar{r}$	Kuadran II Daerah maju tapi tertekan	Kuadran IV Daerah relatif tertinggal

Sumber : Iskandar & Saragih, 2018

Keterangan:

$r_i$  : laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota i di Kedungsepur

$\bar{r}$  : rata-rata laju pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota di Kedungsepur

$y_i$  : PDRB perkapita kabupaten/kota i di Kedungsepur

$\bar{y}$  : rata-rata PDRB perkapita seluruh kabupaten/kota di Kedungsepur

### Analisis Ketimpangan Wilayah

Analisis Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Sjafrizal (2008:108) mengemukakan bahwa data dasar untuk menghitung Indeks Williamson meliputi jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Berikut ini adalah formulasi Indeks Williamson:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{\bar{y}}, 0 < V_w < 1$$

Dimana:

$V_w$  : Indeks Williamson

$y_i$  : PDRB perkapita kabupaten/kota i

$\bar{y}$  : PDRB perkapita rata-rata seluruh daerah (Kedungsepur)

$f_i$  : Jumlah penduduk kabupaten/kota i

$n$  : Jumlah penduduk seluruh daerah (Kedungsepur)

Hasil pengukuran Indeks Williamson besarnya berkisar antara nol hingga satu ( $0 < V_w < 1$ ). Apabila nilai indeks mendekati angka satu maka menunjukkan ketimpangan semakin lebar. Sebaliknya, jika nilai indeks mendekati angka nol, ini menunjukkan ketimpangan semakin kecil atau dapat dikatakan semakin merata.

Analisis ketimpangan wilayah juga dapat dihitung menggunakan Indeks Theil. Kuncoro (2002:87) menyebutkan bahwa konsep entropi Theil dari distribusi adalah penggunaan teori konsep informasi dalam memperkirakan kesenjangan ekonomi dan konsentrasi industri. Liu (2006) menyatakan bahwa indeks ketimpangan regional Theil secara spasial dapat dibagi menjadi dua sub-indeks yaitu ketimpangan interregional antara sekumpulan wilayah dan ketimpangan intraregional dalam suatu wilayah. Berikut ini adalah rumus Indeks Theil:

$$I_{Theil} = \sum (y_j/Y) \times \log[(y_j/Y)/(x_j/X)]$$

Dimana:

$I_{Theil}$  : Indeks Theil

$y_{ij}$  : PDRB perkapita kabupaten/kota j

$Y$  : Rata-rata PDRB perkapita seluruh kabupaten/kota (Kedungsepur)

$x_j$  : Jumlah penduduk kabupaten/kota j

$X$  : Jumlah penduduk seluruh kabupaten/kota (Kedungsepur)

Apabila hasil perhitungan Indeks Theil mendapatkan nilai yang semakin besar maka menunjukkan semakin besar pula ketimpangan di suatu daerah/wilayah. Sebaliknya, apabila nilai Indeks Theil semakin kecil menjelaskan bahwa ketimpangan di suatu wilayah semakin kecil atau semakin merata.

### Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk menganalisis sektor basis pada suatu daerah tertentu. Disebut sebagai sektor basis karena sektor tersebut menjadi tumpuan perekonomian wilayah dan mempunyai keunggulan kompetitif. Menurut Tarigan (2015:82), analisis LQ membandingkan besarnya peranan sektor atau industri di suatu wilayah dengan peranan sektor atau industri serupa secara nasional atau wilayah yang lebih luas. Adapun rumus LQ sebagai berikut.

$$LQ = \frac{S_i/S}{N_i/N}$$

Dimana:

$S_i$  : Nilai tambah sektor i di kabupaten/kota

$S$  : PDRB di kabupaten/kota

$N_i$  : Nilai tambah sektor i di Kawasan Kedungsepur

$N$  : PDRB di Kawasan Kedungsepur

Kriteria pengukuran LQ yang dikemukakan oleh Aswandi & Kuncoro (2002) yaitu: Jika LQ lebih besar dari 1, menerangkan bahwa tingkat spesialisasi suatu sektor di daerah lebih besar daripada tingkat spesialisasi sektor sejenis secara nasional. Jika LQ kurang dari 1, menunjukkan bahwa tingkat spesialisasi suatu sektor di daerah lebih rendah daripada tingkat spesialisasi sektor serupa secara nasional. Jika LQ sama dengan 1, menjelaskan bahwa tingkat spesialisasi suatu sektor secara regional serupa dengan tingkat spesialisasi sektor yang sama secara nasional.

### Analisis Shift-Share

Analisis Shift-Share digunakan untuk melihat kinerja atau produktivitas ekonomi lokal yang dibandingkan dengan wilayah yang lebih besar (regional atau nasional). Dalam analisis shift share terdapat tiga komponen utama. Pertama, komponen pertumbuhan nasional/*national share* ( $N_{ij}$ ), mencerminkan bagaimana perekonomian nasional mempengaruhi perekonomian daerah dan bernilai positif jika pertumbuhan ekonomi daerah melebihi pertumbuhan daerah yang lebih besar (Khuluk, Muljaningsih dan Asmara, 2021). Kedua, komponen pergeseran proporsional (*Proportional Shift*) atau bauran industri ( $M_{ij}$ ), menggambarkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di suatu wilayah dibandingkan dengan sektor serupa di wilayah di atasnya (Pratiwi, 2021). Ketiga, komponen pergeseran diferensial (*Differential Shift*) atau keunggulan kompetitif ( $C_{ij}$ ), mencerminkan daya saing suatu daerah terhadap pertumbuhan sektor sejenis di daerah lain (Abidin, 2015). Widodo

(2006) dan Abidin (2015) menyatakan bahwa bentuk umum persamaan analisis shift-share beserta komponen-komponennya adalah sebagai berikut.

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Keterangan:

$D_{ij}$  : Perubahan sektor i di daerah j (kabupaten/kota)

$N_{ij}$  : Komponen pertumbuhan nasional sektor i di daerah j (kabupaten/kota)

$M_{ij}$  : Komponen pergeseran proporsional sektor i di daerah j (kabupaten/kota)

$C_{ij}$  : Komponen pergeseran diferensial sektor i di daerah j (kabupaten/kota)

Bila analisis ini diterapkan kepada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dinotasikan sebagai (Y) maka:

$$D_{ij} = Y_{ij}^* - Y_{ij}$$

$$N_{ij} = Y_{ij} \cdot r_n$$

$$M_{ij} = Y_{ij} (r_{in} - r_n)$$

$$C_{ij} = Y_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Dimana:  $r_{ij}$ ,  $r_{in}$  dan  $r_n$  melambangkan laju pertumbuhan wilayah dan laju pertumbuhan tingkat nasional yang didefinisikan sebagai berikut:

$$r_{ij} = (Y_{ij}^* - Y_{ij})/Y_{ij}$$

$$r_{in} = (Y_{in}^* - Y_{in})/Y_{in}$$

$$r_n = (Y_n^* - Y_n)/Y_n$$

Keterangan:

$r_{ij}$  : Laju pertumbuhan sektor i di daerah j (kabupaten/kota)

$r_{in}$  : Laju pertumbuhan sektor i di tingkat nasional (Kedungsepur)

$r_n$  : Laju pertumbuhan PDRB di tingkat nasional (Kedungsepur)

$Y_{ij}$  : PDRB sektor i di daerah j (kabupaten/kota)

$Y_{in}$  : PDRB sektor i di tingkat nasional (Kedungsepur)

$Y_n$  : Total PDRB semua sektor di tingkat nasional (Kedungsepur)

Superscript \*: menunjukkan PDRB pada tahun akhir analisis.

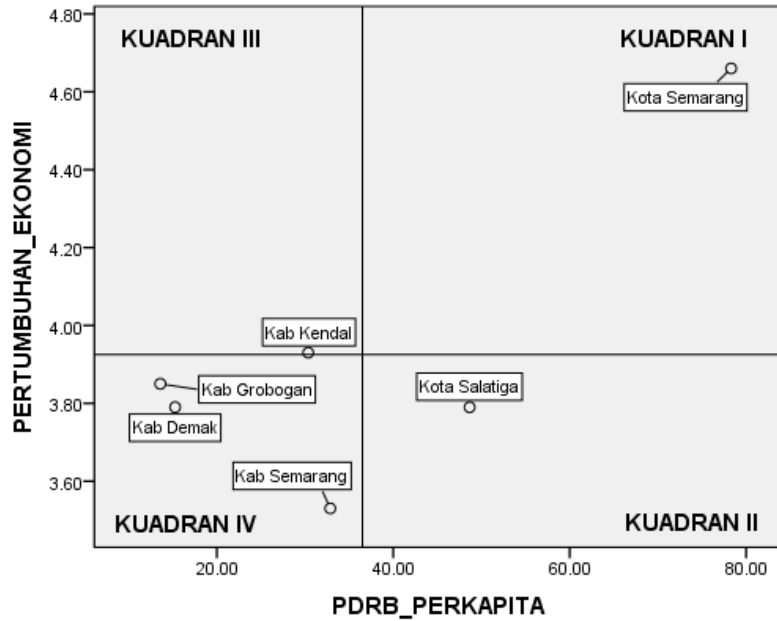
Persamaan shift share untuk sektor i di wilayah j (kabupaten/kota) dapat diselesaikan dengan menjumlahkan persamaan pengaruh pertumbuhan nasional/regional, pergeseran proporsional/bauran industri dan pergeseran diferensial/keunggulan kompetitif untuk semua sektor di seluruh daerah, sebagai berikut:

$$D_{ij} = Y_{ij} (r_n) + Y_{ij} (r_{in} - r_n) + Y_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

### 3. Hasil dan Pembahasan

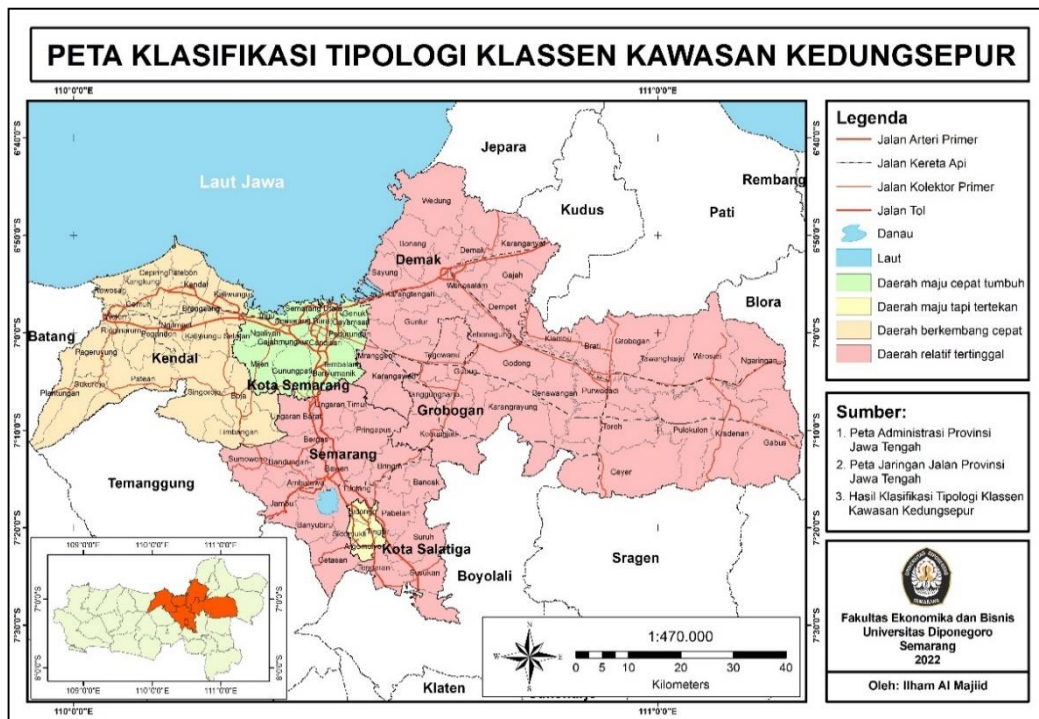
#### Pola Pertumbuhan Ekonomi

Persebaran pola pertumbuhan tiap kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur dapat diketahui dengan analisis tipologi Klassen yang mengelompokkan daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Tipologi Klassen membagi daerah menjadi empat kategori: daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal. Gambar 2 dan Gambar 3 menggambarkan klasifikasi kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur berdasarkan analisis Tipologi Klassen.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (2022)

Gambar 2. Klasifikasi Tipologi Klassen Kawasan Kedungsepur Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Informasi Geospasial (2019); Geoportal Provinsi Jawa Tengah (2019)

Gambar 3. Peta Klasifikasi Tipologi Klassen Kawasan Kedungsepur

Berdasarkan Gambar 2, Kawasan Kedungsepur dapat dikelompokkan menjadi empat kuadran/klasifikasi. Kota Semarang termasuk kuadran I yaitu daerah maju dan cepat tumbuh karena pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya diatas rata-rata seluruh wilayah di Kawasan Kedungsepur. Kota Salatiga terletak pada kuadran II yang mana termasuk daerah maju tapi tertekan karena pendapatan perkapita yang lebih besar namun pertumbuhan ekonominya lebih kecil dari rata-rata seluruh wilayah di Kedungsepur. Kabupaten Kendal termasuk kuadran III yakni daerah berkembang cepat karena pertumbuhan ekonominya yang pesat namun pendapatan perkapitanya lebih rendah dari

rata-rata seluruh wilayah di Kedungsepur. Daerah lainnya termasuk kedalam Kuadran IV, yaitu Kabupaten Semarang, Demak, dan Grobogan. Umumnya daerah pada Kuadran IV termasuk daerah relatif tertinggal baik dari aspek tingkat pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan perkapitanya.

Persebaran pola pertumbuhan berdasarkan klasifikasi tipologi Klassen cenderung kurang merata di Kawasan Kedungsepur. Hal itu dapat dilihat pada Gambar 3 yang mana dari banyaknya daerah dalam kuadran IV cenderung mengelompok di sebelah timur Kawasan Kedungsepur. Daerah dalam kuadran IV tersebut adalah Kabupaten Semarang, Demak, dan Grobogan, yang mana termasuk daerah dengan pembangunan yang relatif tertinggal daripada daerah yang lain.

### Ketimpangan Wilayah

Besar kecilnya PDRB perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota menggambarkan adanya perbedaan kondisi pembangunan kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur. Perbedaan tingkat pembangunan antar kabupaten/kota tersebut menjelaskan adanya ketimpangan pembangunan di Kawasan Kedungsepur. Indeks ketimpangan Williamson dan indeks Theil dapat digunakan untuk menganalisis besarnya ketimpangan yang terjadi. Tabel 4 menampilkan hasil perhitungan Indeks Williamson dan Indeks Theil di Kawasan Kedungsepur Tahun 2017-2021.

Tabel 4. Indeks Williamson dan Indeks Theil Kawasan Kedungsepur Tahun 2017-2021

Tahun	Indeks Williamson	Indeks Theil
2017	0,6777	0,0890
2018	0,6792	0,0889
2019	0,6837	0,0894
2020	0,7392	0,1058
2021	0,7519	0,1085
<b>Rata-Rata</b>	<b>0,7063</b>	<b>0,0963</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4, angka Indeks Williamson Kawasan Kedungsepur selama periode 2017-2021 mempunyai rata-rata sebesar 0,7063. Angka tersebut semakin mendekati satu artinya ketimpangan tergolong tinggi atau pembangunan antar kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur relatif masih belum merata. Selama tahun penelitian, perkembangan Indeks Williamson cenderung mengalami peningkatan yang berarti ketidakmerataan pembangunan semakin besar pada tahun tersebut. Hasil yang diperoleh dari perhitungan Indeks Theil juga sejalan dengan Indeks Williamson dimana ketimpangan mempunyai kecenderungan meningkat selama tahun penelitian. Sutarno dan Kuncoro (2003) menyatakan bahwa Indeks Theil tidak memiliki batas atas maupun batas bawah seperti pada Indeks Williamson sehingga semakin besar angka indeks Theil maka semakin besar pula ketimpangan yang terjadi di Kawasan Kedungsepur.

### Potensi Perekonomian Wilayah

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemerataan perekonomian agar tidak terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota adalah dengan menganalisis potensi perekonomian wilayah atau menggali sektor-sektor berpotensi untuk dikembangkan dengan analisis Location Quotient (LQ) dan Shift-Share. Berdasarkan analisis LQ, sektor ekonomi yang memiliki nilai  $LQ > 1$  menerangkan bahwa peranan sektor tersebut cukup menonjol di daerah yang diamati atau sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif yang disebut dengan sektor basis. Hasil analisis LQ kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur pada tahun 2017-2021 disajikan dalam Tabel 5.



Tabel 5. Hasil Analisis LQ Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsepur Tahun 2017-2021

Sektor	Kab. Grobogan	Kab. Demak	Kab. Semarang	Kab. Kendal	Kota Salatiga	Kota Semarang
S1	<b>3,35</b>	<b>2,56</b>	<b>1,29</b>	<b>2,44</b>	0,55	0,10
S2	<b>3,33</b>	<b>1,16</b>	0,67	<b>2,96</b>	0,11	0,36
S3	0,44	<b>1,02</b>	<b>1,33</b>	<b>1,41</b>	<b>1,03</b>	0,90
S4	0,77	0,81	0,90	<b>1,56</b>	<b>1,68</b>	0,91
S5	0,57	0,93	0,96	0,99	0,98	<b>1,08</b>
S6	0,30	0,50	0,74	0,37	0,75	<b>1,39</b>
S7	<b>1,49</b>	<b>1,16</b>	0,80	0,83	0,96	1,00
S8	<b>1,65</b>	0,93	0,73	0,66	<b>1,07</b>	<b>1,06</b>
S9	<b>1,39</b>	0,74	0,93	<b>1,03</b>	<b>2,31</b>	0,90
S10	0,45	0,36	0,60	0,59	0,56	<b>1,38</b>
S11	<b>1,16</b>	0,68	0,99	0,52	1,00	<b>1,13</b>
S12	0,86	0,49	<b>1,19</b>	0,35	<b>1,91</b>	<b>1,12</b>
S13	0,48	0,48	0,93	0,53	<b>2,24</b>	<b>1,18</b>
S14	<b>1,10</b>	<b>1,14</b>	0,91	0,64	<b>1,72</b>	<b>1,02</b>
S15	<b>1,56</b>	<b>1,42</b>	<b>1,22</b>	0,83	<b>1,53</b>	0,81
S16	<b>1,26</b>	0,98	0,93	0,83	<b>1,89</b>	0,96
S17	<b>2,08</b>	<b>1,86</b>	0,94	0,95	0,73	0,78

Sumber : Data PDRB Provinsi Jawa Tengah 2017-2021 (diolah)

Keterangan:

S1=Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; S2=Pertambangan dan Penggalian; S3=Industri Pengolahan; S4=Pengadaan Listrik dan Gas; S5=Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; S6=Konstruksi; S7=Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; S8=Transportasi dan Pergudangan; S9=Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; S10=Informasi dan Komunikasi; S11=Jasa Keuangan dan Asuransi; S12=Real Estate; S13=Jasa Perusahaan; S14=Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; S15=Jasa Pendidikan; S16=Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; S17=Jasa Lainnya

Berdasarkan hasil analisis LQ tiap kabupaten/kota pada periode tahun 2017-2021, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan basis sektor di Kabupaten Grobogan, Demak, Kendal, dan Semarang. Sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi sektor basis di Kabupaten Grobogan, Kendal, dan Demak. Sektor Industri Pengolahan menjadi basis di Kabupaten Kendal, Semarang, Demak dan Kota Salatiga. Sektor Pengadaan Listrik dan termasuk basis sektor di Kota Salatiga dan Kabupaten Kendal. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; sektor Konstruksi; serta sektor Informasi dan Komunikasi hanya menjadi basis di Kota Semarang. Sektor basis pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dimiliki oleh Kabupaten Grobogan dan Demak. Sektor Transportasi dan Pergudangan menjadi basis sektor di Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga, dan Kota Semarang. Sektor basis pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dimiliki oleh Kota Salatiga, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Kendal. Sektor basis pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dimiliki oleh Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang. Sektor Real Estate termasuk basis sektor di Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang. Sektor Jasa Perusahaan menjadi basis di Kota Salatiga dan Kota Semarang. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menjadi sektor basis di Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Grobogan, dan Kota Semarang. Sektor basis pada sektor Jasa Pendidikan dimiliki oleh Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, dan

Kabupaten Semarang. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menjadi basis di Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan. Sektor Jasa Lainnya menjadi sektor basis di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak.

Analisis Shift Share digunakan untuk membandingkan perubahan struktur/kinerja perekonomian daerah (kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur) dengan struktur ekonomi daerah yang lebih tinggi (Kedungsepur). Perubahan relatif kinerja perekonomian kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu national share (Nij) menunjukkan bagaimana perekonomian daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi nasional, pergeseran proporsional (Mij) membandingkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di suatu daerah dengan sektor sejenis di daerah yang lebih tinggi, dan pergeseran diferensial (Cij) mengetahui daya saing atau tingkat kompetitif sektor daerah terhadap perekonomian daerah di atasnya.

Berdasarkan analisis shift share di Kawasan Kedungsepur pada periode tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa kinerja perekonomian sebagian besar sektor tiap kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur mengalami kenaikan. Hal itu dapat diketahui dari nilai positif shift-share pada sebagian besar sektor ekonomi di kabupaten/kota, kecuali sektor Transportasi dan Perdagangan di seluruh kabupaten/kota dan sektor Pertambangan dan penggalian di Kabupaten Demak dan Kota Salatiga. Beberapa komponen mempengaruhi perubahan kinerja setiap sektor tersebut. Komponen national share (Nij) pada seluruh sektor tiap kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur mempunyai efek positif yang berarti pertumbuhan seluruh sektor tiap kabupaten/kota secara positif dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional. Rata-rata pengaruh pertumbuhan nasional tertinggi di setiap kabupaten/kota ada pada sektor Industri Pengolahan dan terendah di sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Sementara itu, Kota Semarang mendominasi pengaruh pertumbuhan nasional tertinggi hampir pada semua sektor di Kawasan Kedungsepur.

Komponen pergeseran proporsional/bauran industri (Mij) mempunyai nilai positif pada 7 sektor di seluruh kabupaten/kota, yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Perusahaan; dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ketujuh sektor tersebut mengalami pertumbuhan relatif lebih cepat terhadap sektor serupa di Kedungsepur. Sedangkan 10 sektor lainnya mempunyai nilai Mij negatif, yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Konstruksi; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Transportasi dan Perdagangan; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor Real Estate; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Sektor Jasa Pendidikan; dan Sektor Jasa Lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesepuluh sektor tersebut mempunyai pertumbuhan relatif lebih lambat terhadap sektor sejenis di Kedungsepur.

Komponen pergeseran diferensial/keunggulan kompetitif (Cij) menunjukkan suatu sektor memiliki keunggulan kompetitif apabila mempunyai nilai Cij positif. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mempunyai keunggulan kompetitif di Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang. Keunggulan kompetitif pada sektor Pertambangan dan Penggalian dimiliki oleh Kabupaten Grobogan dan Kendal. Sektor Industri Pengolahan mempunyai keunggulan kompetitif di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang. Keunggulan kompetitif sektor Pengadaan Listrik dan Gas terdapat di Kabupaten Grobogan, Semarang, Demak dan Kota Salatiga. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mempunyai keunggulan kompetitif di Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Keunggulan kompetitif sektor Konstruksi terdapat di Kabupaten Demak dan Kendal. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai keunggulan kompetitif di Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan. Keunggulan kompetitif sektor Transportasi dan Perdagangan; dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terdapat di Kabupaten Grobogan, Demak, Semarang,

Kendal, dan Kota Salatiga. Sektor Informasi dan Komunikasi mempunyai keunggulan kompetitif di Kabupaten Demak, Grobogan, Kota Salatiga, dan Kota Semarang. Keunggulan kompetitif sektor Jasa Keuangan dan Asuransi terdapat di Kabupaten Grobogan, Demak, dan Kabupaten Semarang. Keunggulan kompetitif sektor Real Estate hanya dimiliki oleh Kota Semarang. Sektor Jasa Perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif di Kabupaten Demak, Semarang, dan Kota Salatiga. Keunggulan kompetitif sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib terdapat di Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Semarang, dan Demak. Sektor Jasa Pendidikan mempunyai keunggulan kompetitif di Kabupaten Semarang, Demak, dan Kendal. Keunggulan kompetitif sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial hanya terdapat di Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Sektor Jasa Lainnya mempunyai keunggulan kompetitif di seluruh kabupaten/kota di Kedungsepur, kecuali Kota Semarang.

Sektor dengan keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif mempunyai potensi untuk dikembangkan guna meningkatkan perekonomian daerah. Berdasarkan analisis LQ telah diketahui sektor dengan keunggulan komparatif yang dilihat dari basis sektornya dan dari analisis shift-share telah diketahui sektor apa saja yang memiliki keunggulan kompetitif di Kawasan Kedungsepur. Maka dari itu, sektor-sektor yang berpotensi dikembangkan guna meningkatkan perekonomian kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur adalah sebagai berikut: Kabupaten Grobogan mempunyai sektor potensial di sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; dan sektor Jasa Lainnya. Kabupaten Demak memiliki sektor potensial di sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; sektor Jasa Pendidikan; dan sektor Jasa Lainnya. Kabupaten Semarang mempunyai sektor potensial di sektor Jasa Pendidikan. Kabupaten Kendal memiliki sektor potensial di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Pertambangan dan Penggalian; dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Kota Salatiga memiliki sektor potensial di sektor Pengadaan Listrik dan Gas; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; sektor Jasa Perusahaan; dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Kota Semarang memiliki sektor potensial di sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; sektor Informasi dan Komunikasi; dan sektor Real Estate.

#### **4. Simpulan dan Saran**

##### **Simpulan**

Pola pertumbuhan kabupaten/kota berdasarkan pengklasifikasian tipologi Klassen menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Kawasan Kedungsepur selama tahun 2017-2021 termasuk daerah relatif tertinggal dan cenderung mengelompok di sebelah timur Kawasan Kedungsepur, yakni Kabupaten Semarang, Demak, dan Grobogan. Berdasarkan Indeks Williamson dan Indeks Theil menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur pada tahun 2017-2021 tergolong tinggi dan cenderung mengalami kenaikan hingga akhir tahun penelitian. Sektor potensial dengan peranan terbesar yang dapat dikembangkan tiap kabupaten/kota berdasarkan analisis Location Quotient dan Shift-Share adalah sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor jasa-jasa di Kabupaten Grobogan; sektor jasa-jasa di Kabupaten Demak; sektor jasa pendidikan di Kabupaten Semarang; sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor pertanian di Kabupaten Kendal; sektor akomodasi dan makan minum, dan sektor jasa perusahaan di Kota Salatiga; serta sektor informasi dan komunikasi di Kota Semarang.

##### **Saran**

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan hendaknya lebih memprioritaskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah pada daerah-daerah yang relatif tertinggal tanpa

melupakan daerah yang lain. Pemerintah daerah hendaknya lebih memperhatikan aspek pemerataan dalam pembangunan antar wilayah, dengan mengoptimalkan sektor-sektor unggulan serta perbaikan infrastruktur dan fasilitas penunjang, khususnya di daerah yang cenderung lemah perekonomiannya. Berkaitan dengan kebijakan pembangunan sektoral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, hendaknya mengutamakan sektor-sektor potensial yang dimiliki oleh setiap daerah, dengan tetap memperhatikan sektor lainnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pengembangan sektor potensial tersebut hendaknya didasarkan pada keterkaitan antarsektor dan kerjasama antardaerah sehingga dapat menggerakkan perekonomian melalui pertukaran komoditas antardaerah.

### Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2015) "Aplikasi Analisis Shift Share pada Transformasi Sektor Pertanian dalam Perekonomian Wilayah di Sulawesi Tenggara," *Jurnal Informatika Pertanian*, 24(2), hal. 165–178.
- Aswandi, H. dan Kuncoro, M. (2002) "Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999," *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 17(1), hal. 27–45. doi:10.22146/jieb.6703.
- Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia (2019) *Peta Rupa Bumi Digital Indonesia*. Tersedia pada: <https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web/> (Diakses: 3 Oktober 2022).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2022a) *Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2017-2021*. Tersedia pada: <https://jateng.bps.go.id/indicator/157/1743/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html> (Diakses: 4 April 2022).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2022b) *PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2017-2021*. Tersedia pada: <https://jateng.bps.go.id/indicator/157/1741/1/-seri-2010-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html> (Diakses: 4 April 2022).
- Geoportal Provinsi Jawa Tengah (2019) *Peta Jaringan Jalan Provinsi Jawa Tengah*. Tersedia pada: <http://geoportal.jatengprov.go.id/> (Diakses: 3 Oktober 2022).
- Iskandar, A. dan Saragih, R. (2018) "Analisis Kondisi Kesenjangan Ekonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan," *Jurnal Info Artha*, 2(1), hal. 37–52.
- Iswanto, D. (2015) "Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur," *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), hal. 41–66.
- Kadriwansyah, Semmaila, B. dan Zakaria, J. (2021) "Analisis Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018," *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), hal. 25–36.
- Khuluk, D.R.K., Muljaningsih, S. dan Asmara, K. (2021) "Analisis Disparitas Pendapatan Antar Wilayah di Daerah Penyangga Surabaya," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(1), hal. 9–24.
- Kuncoro, M. (2002) *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Liu, H. (2006) "Changing Regional Rural Inequality in China 1980-2002," *Area*, 38(4), hal. 377–389.

- Mopangga, H. (2011) "Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo," *Trikonomika*, 10(1), hal. 40–51.
- Pratiwi, M.C.Y. (2021) "Analisis Ketimpangan Antarwilayah dan Pergeseran Struktur Ekonomi di Kalimantan," *Jurnal Borneo Administrator*, 17(1), hal. 131–154. doi:10.24258/jba.v17i1.779.
- Sjafrizal (2008) *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang, Sumatera Barat: Baduose Media.
- Sutarno dan Kuncoro, M. (2003) "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1993-2000," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), hal. 97–110.
- Sutrisno, A. (2012) "Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Pengembangan Sektor Unggulan di Kabupaten dalam Kawasan Baerlingmascakeb Tahun 2007-2010," *Economics Development Analysis Journal*, 1(1), hal. 42–49.
- Tarigan, R. (2015) *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Cet. 8. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. (2012) *Economic Development*. 11 ed. Boston: Addison-Wesley.
- Vaulina, S. dan Liana, L. (2015) "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Riau," *Jurnal Dinamika Pertanian*, 30(3), hal. 261–272.
- Widodo, T. (2006) *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yuliani, T. (2015) "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Kalimantan Timur," *JEJAK (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan)*, 8(1), hal. 45–53. doi:10.15294/jejak.v7i1.